

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA KLIPING

KLASIFIKASI: Universitas Indonesia – Penulis UI

TEMA : Solusi Politik Harus Dikedepankan untuk Terorisme (Mulyadi M. Phillian)

SURAT KABAR/MAJALAH : Sinar Harapan

Hari Rabu Tanggal 20 Bulan Juli Tahun 2005 Halaman 9 Kolom 3-6

RINGKASAN

Mulyadi M. Phillian, peneliti pada *Centre for International Relations Studies (CIRes)* FISIP UI, menulis tentang ledakan bom di stasiun London beberapa waktu lalu telah membuat pemerintah Inggris menyatakan perang melawan terorisme. Dalam menyelesaikan masalah terorisme, pendekatan militer dijadikan sebagai solusi yang dalam beberapa sisi memiliki keunggulan. Namun, solusi politik juga dapat dijadikan sebagai langkah penyelesaiannya. Karena terorisme bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan berbagai kebijakan politik, ekonomi dan sosial lainnya, baik secara eksternal maupun internal.

REKOMENDASI

Solusi Politik Harus Dikedepankan untuk Terorisme

Oleh

MULYADI M. PHILLIAN

Pertemuan puncak pemimpin negara-negara maju yang tergabung dalam G-8 di Edinburgh Skotlandia pada 6-7 Juli lalu berakhir dengan sebuah kecamasan. Ledakan bom di kota London pada hari terakhir pertemuan itu menghantakkan kesadaran bahwa dunia belum steril dari teroris. Perang melawan terorisme masih merupakan agenda besar yang harus diprioritaskan masyarakat global agar tercipta keharmonisan dan pertamalan. persoalannya apakah solusi militer masih dominan dalam menyelesaikan terorisme?

Pendekatan militer yang dikomandani AS dalam memerangi terorisme sejak peristiwa 11 September 2001 ternyata tidak menuntaskan masalah ini secara permanen. Aksi teror terus terjadi secara sporadis, tanpa bisa diprediksi. New York, Bali, Madrid dan kini London menjadi sasaran. Agaknya penyelesaian terorisme memerlukan pendekatan baru. Christian Reus Smit (2001), ahli hubungan internasional dari *The Australian National University* menyatakan "agar perang melawan terorisme berhasil, solusi politik harus lebih diprioritaskan dibanding solusi militer."

Penyelesaian masalah terorisme transnasional dengan solusi militer dalam beberapa sisi memang memiliki keunggulan. Pendekatan militer umpamanya dapat menekan gerakan teroris di suatu tempat, menghancurkan markasnya, juga menangkap pimpinan

dan anggotanya. Tetapi pada saat bersamaan gerakan teroris dapat berpindah dan beraksi di tempat lain yang sulit diketahui.

Kemenangan militer AS dan sekutu dalam perang Afghanistan dan Irak sebagai bagian dari agenda melawan terorisme tidak serta merta menunjukkan kemenangan AS dalam perspektif politik. Kemenangan militer ternyata masih menyisakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan militer konvensional.

Hilangnya Kepercayaan

Solusi politik dalam memerangi terorisme dapat dilakukan dengan: *Pertama*, merekonstruksi kebijakan terhadap kawasan konflik. Dalam konteks ini, Smit menyebutkan prioritas yang harus ditunjukkan AS dan negara-negara maju lainnya adalah penyelesaian konflik Timur Tengah seperti konflik Israel-Palestina.

Eskalasi konflik yang tidak pernah surut akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap komitmen AS dan negara Barat lainnya dalam mendorong terciptanya perdamaian kawasan. Ketidakmampuan menyelesaikan konflik secara proporsional akan melahirkan kekesewaan yang terakumulasi dalam berbagai bentuk, termasuk terorisme.

Terorisme bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan berbagai kebijakan politik, ekonomi dan sosial lainnya, baik secara eksternal maupun internal. Ketidakadilan AS dan negara-negara Barat lainnya dalam konflik Timur Tengah merupakan salah satu sumber motivator eksternal para

teroris untuk menghancurkan segala sesuatu yang berhubungan dengan AS dan sekitarnya.

Dalam perspektif inilah almarhum Paus Yohanes Paulus II selalu menyampaikan pesan dan dorongan bagi terwujudnya perdamaian bagi kawasan yang dirundung konflik berkepanjangan. Terciptanya keadilan dan pertamanaan kawasan ini jelas akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengurangi aksi terorisme.

Sumber internal biasanya lebih terkait dengan nilai dan alam pikir yang dianut oleh pelaku dan kelompok teroris. Keterbatasan dalam memahami universalisme nilai-nilai jelas akan membatasi penyikiran untuk memaknai kebenaran dari perspektif yang berbeda. Dalam konteks ini ide mantan Presiden Iran Mohammed Khatami yang mengagagas dialog antar-peradaban merupakan salah satu upaya yang sangat berharga untuk menjembatani perbedaan tersebut.

Di samping meningkatkan komunikasi, dialog juga akan menghilangkan stigmatisasi yang muncul karena memiliki diferensiasi tataran nilai. Hal ini akan mendorong terwujudnya kerja sama dalam menciptakan perdamaian dan melawan aksi teroris.

Kedua, menghentikan tindakan unilateral dan mengedepankan multilateralisme. Komitmen untuk mengedepankan solusi politik harus juga dibarengi komitmen untuk memperkuat tindakan multilateralisme. Sebab, perang terhadap terorisme memerlukan koordinasi multilateral yang dilakukan secara lebih ekstensif dan mendalam. Koordinasi multilateral pada tingkat

tertentu mengharuskan negara-negara menyusun sistem hukum dan politik yang dapat mereduksi gerakan terorisme.

Hal ini menjadi penting karena sistem sel terorisme memiliki jaringan kerja yang begitu luas dan melintasi batas negara, dan kebijakan multilateral akan menjadi payung bagi menuntaskan kejahatan terorisme secara kolektif. Kalau dalam perang Afghanistan dan Irak, AS lebih mengutamakan tindakan unilateral, dalam penanganan kasus terorisme ke depan semua negara harus menunjukkan komitmen untuk lebih mengedepankan pendekatan dan tindakan multilateralisme.

Kebijakan multilateralisme akan mendorong PBB untuk kembali memainkan perannya secara optimal. Sebab, dominasi unilateralisme AS cenderung mengabaikan dan menyebabkan mandulnya peran institusi PBB termasuk perang melawan terorisme, peran institusi PBB jelas sangat signifikan. Resolusi PBB akan mengikat semua negara untuk bekerja sama menciptakan rasa aman dari teror yang mematikan.

Menciptakan keamanan global memang bukan pekerjaan sederhana, apalagi memerangi terorisme. Di sinilah pentingnya kesadaran untuk menciptakan kerja sama lintas negara, lintas agama, dan lintas sektoral lainnya. Kerja sama seperti ini pada akhirnya akan menepis kekhawatiran yang berkepanjangan terhadap tindakan teroris transnasional.

Penulis adalah Peneliti pada Centre for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI

tor